

BAB II

ANALISIS DIMENSI TEKS DAN REPRESENTASI MARGINALISASI DALAM NOVEL *BUNGKAM SUARA*

Penelitian ini berfokus untuk memahami makna wacana marginalisasi dalam novel *Bungkam Suara* peneliti menggunakan analisis dimensi teks teori Teun A. Van Dijk. Berdasarkan analisis, ditemukan empat dimensi marginalisasi menurut Perlman dalam (Prihatin et al., 2025, hlm.207) yakni dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi budaya, serta dimensi politik. Keempat dimensi marginalisasi tersebut diteliti dengan analisis dimensi teks Van Dijk yang meliputi analisis struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro (Eriyanto, 2011, hlm. 228).

A. Struktur Makro

Hal yang diamati dari struktur makro adalah tema dan elemen topik yang ada dalam novel *Bungkam Suara*. Penentuan tema dan sub tema dilakukan dengan membaca wacana secara keseluruhan lalu mengambil kutipan teks yang sering diulang dalam novel, berikut kutipan teks yang merepresentasikan tema:

Timmy melotot mendengar itu, menutup mulut adiknya. “Hei. **Jangan berkata kasar! Kamu bisa ditangkap. Ini belum Hari Bebas Bicara!**” (Khairen, 2023, hlm.5).

“Cepat saja, mereka langsung menuding Ayah Timmy. **Hukum raja tak perlu Undang-Undang.** Jika raja bertitah *tangkap*, maka *tangkap*.” (Khairen, 2023, hlm.67).

Kutipan di atas menggambarkan pembungkaman kebebasan berekspresi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin yang manipulatif dan menindas rakyatnya demi kepentingan pribadi sehingga rakyat tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada pemimpin. Kalimat serupa juga berulang disampaikan dalam novel, sehingga novel ini mengangkat tema kritik sosial terhadap kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan kekuasaan.

Masyarakat digambarkan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Kalimat “*Jangan berkata kasar! Kamu bisa ditangkap!*” sangat kontras dengan kalimat “*Hukum raja tak perlu undang-undang. Jika raja bertitah tangkap, maka tangkap!*” yang menunjukkan adanya aturan yang membatasi peran masyarakat pada ranah politik. Hal ini merepresentasikan marginalisasi politik, yang mana kelompok atau individu tidak memiliki akses yang setara pada kekuasaan, pengambilan keputusan, bahkan hanya menyampaikan pendapat. Terdapat beberapa sub topik yang mendukung topik utama tersebut, diantaranya pada kutipan:

“Jujur, oh Jujur. Namamu itu seharusnya bukan Jujur, tapi Polos. **Ini era propaganda terkompulasi.** Pikiran kita, **pikiran orang-orang mudah sekali dicuci.** Buat pemberitaan secara terprogram, bayar *buzzer*, bikin berita judul aneh-aneh, bikin gerakan-gerakan, kampanye moral, propaganda, itu semua sudah umum. Kita sering membahas ini di seminar dan kuliah-kuliah umum. Rakyat diadu dengan rakyat, dengan aparat, dengan semua pihak. Berdarah-darah, **caci maki, demi uang, kedudukan, atau bahkan sekadar pamor.** Kau tidak sekali dua kali melihat selebriti mencari sensasi, bukan? Itu hanya contoh kecilnya, Jujur.” (Khairan, 2023, hlm.94).

Berdasarkan kutipan tersebut, penulis menyampaikan betapa mudahnya masyarakat yang tidak memiliki literasi kritis dimanipulasi oleh informasi yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Pada bagian ini pula ditegaskan bagaimana cara kerja penguasa untuk melanggengkan kedudukan dan memperkuat citra politik dengan membuat propaganda untuk menggiring opini publik agar mendukung tujuan tertentu. Dan pada saat itu pula narasi paling dominanlah yang dianut masyarakat tetapi tidak menjamin pula narasi dominan tersebut benar dan menguntungkan masyarakat.

Ia sudah memutuskan satu wajah, yaitu wajah Raja Wiranagara. Namun, di detik terakhir, Timmy akhirnya malah memunculkan wajahnya sendiri. ... “**Suara kita dibungkam selama ini. Sekalinya dibebaskan,** rupanya, rupanya membuat kita **saling memusnahkan.**” (Khairan, 2023, hlm.350)

Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya menyadari bahwa selama ini suara mereka dibungkam dan tidak memiliki akses terhadap ruang

bicara ataupun kekuasaan dalam menyampaikan aspirasi. Namun, kutipan ini juga menunjukkan kritik terhadap kebebasan berbicara yang tidak diiringi kesadaran sosial, kebebasan yang muncul satu tahun sekali setelah pembungkaman justru berkembang menjadi pertikaian antarkelompok dan hilangnya kepercayaan antar elemen masyarakat.

Hal ini memperlihatkan dampak dari sistem kekuasaan yang sebelumnya menekan masyarakat terlalu lama, sehingga ketika ruang bicara dibuka, masyarakat tidak lagi menggunakan kebebasan untuk membangun kritik dan saran guna perbaikan, melainkan untuk menyerang satu sama lain. Masyarakat yang lama dibungkam ini merepresentasikan marginalisasi politik melalui pembungkaman suara oleh kebijakan penguasa yang pada akhirnya memunculkan kekacauan ketika kebebasan diberikan tanpa kontrol dan persiapan sosial. Alih-alih membawa keadilan, Hari Bebas Bicara tanpa adanya batas ini justru dimanfaatkan untuk menyebarkan aib, fitnah, dan perundungan yang memicu perpecahan antar masyarakat.

Tabel 2.1 Analisis Struktur Makro

Tema Umum	Kritik sosial terhadap kebebasan berbicara dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sub tema	a. Propaganda penggiringan opini sebagai bentuk dominasi kekuasaan. b. Kebebasan berbicara tanpa batas memicu konflik sosial.

B. Superstruktur

Tahapan alur yang akan diteliti dalam novel *Bungkam Suara* karya J.S. Khairen dimulai dari penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan konflik, klimaks, dan penyelesaian (Munaris et al., 2023, hlm.29). Tahap penyituasian dapat dilihat pada kutipan berikut:

Cuma seorang yang mau menyapa burung itu. Seorang pemuda bernama Jujur Timur. Kebetulan, si beo ini milik tetangganya.
“Timmy, Timmy,” kata si beo saat dulu menyapa pertama kali, bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, orang-orang ikut memanggilnya dengan nama Timmy.

Namun kini semua orang di Distrik Neang benci keluarga Timmy. Itu karena kejadian setahun lalu, saat Ayahnya dihukum, jadi pendosa besar di negeri ini. (Khairan, 2023, hlm. 1-2).

Kutipan di atas, penulis mulai memperkenalkan tokoh dengan burung beo yang memanggil tokoh utama utama bernama Jujur Timur (Timmy) serta latar tempat di Distrik Neang. Kutipan ini menceritakan bahwa kehidupan awal mereka biasa saja sampai akhirnya sang ayah terseret skandal besar sehingga mengubah pandangan masyarakat terhadap keluarga Timmy. Dalam hal ini pembaca mulai mengetahui situasi latar dan tokoh dalam cerita. Selanjutnya, pada tahap pemunculan konflik dapat dilihat pada kutipan berikut:

Prof. Terang menempelkan peluit itu di gadgetnya, dan mulai melakukan pemindaian. “Ada sinyal yang mereka lacak, seperti dugaanku. Pelacak ini akan aktif dengan sendirinya saat seseorang mengaksesnya lewat komputer. Itulah kenapa tadi malam kau digeruduk oleh mereka, Tim. Ada info yang tak boleh bocor, yang telah ayahmu simpan di dalam ini. Pihak Kerajaan takut sekali.” (Khairan, 2023, hlm. 90)

Berdasarkan kutipan di atas, penulis mulai menampilkan peristiwa dengan memunculkan masalah yang menjadi penyebab munculnya konflik. Konflik ini muncul ketika Timmy menemukan peluit ayah yang berisi *micro SD* dan mencoba mencari tahu isinya dengan menghubungkannya pada komputer yang ada di rumahnya. Tak berapa lama setelah *micro SD* tersebut terbuka, datanglah para Algojo Raja yang langsung menyergap Timmy dan menghancurkan komputer yang tadi Timmy gunakan. Namun ternyata *micro SD* yang dicari para Algojo Raja masih ada digenggaman Timmy, sehingga Timmy akan selalu diincar oleh Aljogo Raja. Sampai akhirnya datanglah Prof. Terang yang membantu Timmy serta ibu dan adiknya untuk menjamin keamanannya, hal itu dibayar dengan bergabungnya Timmy pada komunitas propaganda terkomputasi milik Prof. Terang. Pada tahap peningkatan konflik dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

Kotak itu dibuka, tampak beberapa jarum suntik dan botol-botol yang Timmy tidak paham. Prof. Terang mengambil satu jarum suntik. “Sayang sekali.”

Timmy menyaksikan kejadian itu di depan matanya. Ia tak banyak mengerti. “Suntikan apa itu? Apa yang akan terjadi?” Timmy berbisik pada Chicha.

Chicha mengambangkan tangan kananya tepat di depan leher, lalu menggerakannya horizontal.

“Mati?” Timmy melotot.

Chicha mengangguk. “Dia pengkhianat. Melanggar pakta integritas.”

Jarum suntik itu tinggal tiga jengkal, dua jengkal, satu jengkal, dan kini menempel di kulit Taly, tinggal disuntikkan. Saat itulah Timmy berteriak.

“Prof., jangan!”

Mendengar itu, Prof. Terang terhenti.

“Oh, rupanya anak Hendi ini pengkhianat juga? Sudah sejak awal saya bilang, tak bisa main izinkan anak baru masuk tanpa orientasi!” ketus Dutak di belakang Prof. Terang. Ia melirik ke arah jarum suntik. “Masih banyak sisa suntikan di sini. Habis ini giliranmu anak baru!” (Khairen, 2023, hlm.182).

Di ruangan pohon atas, beberapa orang mulai menyadari, Dr. Rango Yatmerak menganga melihat apa yang terjadi. Seorang anak muda membajak kendaraannya. Kendaraan dengan sistem terancang di NKAL. Di ruangan atas, Dutak dongkol. “Pengkhianat! Hendi brengsek! Membesarkan anak ular!” Ia menatap Prof. Terang, seakan menang. “Siapa yang tempo hari yakin betul menerima anak ini jadi bagian kita?” (Khairen, 2023, hlm. 223).

“Kami tak butuh data itu. Itu kan data kami yang punya, buat apa kami kejar? Justru Terang dan Rango Yatmerak lah yang mengincarnya sejak lama,” jelas Raja Wiranagara dengan nada prihatin. “Kasihannya sekali. Tak cukup mereka menumbalkan Ayahmu, sekarang kau yang mereka gunakan sebagai alat.”

Timmy benar-benar bingung kali ini, ia merasa sangat bodoh. Siapa yang benar dari semua rekayasa ini? Kenapa semua terkesan berpusat padanya. Kenapa semua terkesan tak ada yang dapat dipercaya? (Khairen, 2023, hlm. 249).

Kutipan teks di atas menambahkan konflik yang semakin meningkat dan tidak dapat dihindarkan sehingga menimbulkan perdebatan diantara tokoh. Perdebatan ini muncul karena konflik sebelumnya yang bertambah meningkat, di mana Prof. Terang memberi Timmy tugas untuk mencari pengkhianat dalam komunitasnya, tetapi Timmy terlambat menemukan dan baru diketahui ternyata pengkhianat itu adalah Taly, anggota

inti Prof. Terang yang telah Timmy ajak diskusi banyak hal sebelumnya. Sehingga seluruh rencana propaganda Prof. Terang untuk Hari Bebas Bicara sudah diketahui oleh pihak musuh yaitu kerajaan.

Taly yang akan dihukum suntik mati dihentikan oleh Timmy karena ia memiliki solusi lain untuk memanfaatkan Taly, hal ini memicu perdebatan antara anggota inti lain, terutama Dutak yang dari awal tidak setuju jika Timmy masuk komunitas propaganda Prof. Terang tanpa orientasi terlebih dahulu, sehingga dengan logis dapat menuduh Timmy sebagai pengkhianat kedua. Hal itu diperkuat ketika Timmy menggunakan kendaraan Pemangku Adat tanpa izin untuk ke Istana Kerajaan. Timmy berada di tengah kekacauan ini berusaha untuk mencari kebenaran tentang siapa yang sebenarnya baik atau jahat, mengingat persepsi terhadap tokoh-tokohnya terus berubah bahkan ketika Timmy berusaha mencari kejelasan di Istana Kerajaan. Selanjutnya, tahap klimaks dapat dilihat pada kutipan berikut:

Nenek pun mengangguk pada bawahannya yang lain. Tepat saat itu, ia juga membajak sinyal komunikasi pihak Kerajaan pada para Tentara.

“Sudah,” kata orang itu.

Nenek langsung mengambil alih. Ia mengetik pesan, lalu mengirimnya pada pasukan Tentara Kerajaan yang ada di lapangan. Serempak mereka semua membaca pesan yang sama.

Tembak. Tak boleh ada yang lolos.

Di kendaraan masing-masing, para Tentara Kerajaan itu saling lirik. Mereka membaca pesan dari Raja Wiranagara untuk menyerang sesama angkatan bersenjata. Namun perintah adalah perintah. Hanya menunggu satu detik, dua detik, tiga detik, sebuah *cheetah* robot, disusul tiga kendaraan berbentuk tutup pulpen melakukan tembakan.

Pasukan Kepolisian Kerajaan pun membalas serangan. Tadi mereka hanya dapat pesan dari Pemangku Adat hanya untuk muncul saja. Muncul menghadang, pamer kekuatan. Harapannya, Raja Wiranagara mau membebaskan Dr. Rango Yatmerak dan Prof. Terang Setiawan. Itulah bahasa komunikasi politiknya.

Rupanya rencana itu tak berhasil. Begitu juga Raja Wiranagara. Tujuan menangkap Dr. Rango Yatmerak dan Prof. Terang juga untuk unjuk kekuatan saja, tanpa harus saling serang.

Celah ini, sedari awal ternyata sudah diikuti oleh nenek tua dan pasukannya di pasar. Propaganda mereka ternyata jauh lebih berhasil

daripada yang dilakukan pemilik kekuasaan. (Khairén, 2023, hlm. 300-301)

Pada kutipan teks di atas, penulis menambahkan masalah hingga konflik semakin memuncak di tahap klimaks. Tepat di Hari Bebas Bicara yang diselenggarakan satu tahun sekali, di mana siapa saja boleh berbicara atau membongkar aib apa pun tanpa takut terjerat hukum dengan dalih memberikan masukan dan kritik untuk mencapai keadilan sosial, ketegangan mencapai titik tertinggi. Ketika Kepolisian Kerajaan dan Tentara Kerajaan saling menyerang karena perintah seorang nenek tua yang meretas sistem komunikasi dan mengadu domba antar penguasa, fitnah dan kekacauan semakin tak terkendali.

Bahkan negara berada di ambang kehancuran karena narasi nenek tua dan keahlian meretasnya untuk mengadu domba pemilik kekuasaan serta menggiring opini publik untuk melakukan aksi demonstrasi kepada Raja Wiranagara. Sehingga nyawa Pemangku Adat, Prof. Terang, Raja Wiranagara, termasuk nasib keluarga Timmy dan Kayes, berada di ujung tanduk di tengah masyarakat yang saling menghancurkan. Selanjutnya, tahap penyelesaian dapat dilihat pada kutipan berikut:

Di satu dua jam menjelang Hari Bebas Bicara ditutup, isi kepala orang-orang masih diombang-ambingkan. Kali ini, banjir simpati malah mengarah pada Timmy dan keluarganya.

“Jika memang keluarga mereka pencuri, kenapa mereka tak pernah kaya? Harusnya dari sini kita sudah curiga.”

“Jika keluarga biasa-biasa saja bisa jadi tumbal, maka berikutnya bisa saja keluarga kita.” (Khairén, 2023, hlm. 345)

Dua belah pasukan melihat semua yang terjadi. Entah siapa yang memberi komando duluan. Mereka serempak sama-sama menurunkan senjata. Berhenti saling serang, lalu segera menyelamatkan kawan masing-masing. Ditengah-tengah mereka, Prof. Terang Setiawan juga berusaha menyelamatkan Dr. Rango Yatmerak. Takdir memutuskan, kawannya itu tak lagi bernapas. (Khairén, 2023, hlm. 358)

Nenek Lefronka berada di antara rasa puas dan tidak. Ia puas cita-citanya tercapai: jatuhnya dua kepemimpinan dalam satu malam. Yang

membuatnya tidak puas adalah jatuhnya bukan ke tangan dia, melainkan ke tangan entah siapa. Kedua, tidak puas karena perlawanan dari Timmy dan orang-orang Distrik Neang yang menghambat pergerakannya. (Khairen, 2023, hlm. 362)

Kutipan teks di atas menampilkan tahap penyelesaian konflik di antara kelompok dengan berakhirnya Hari Bebas Bicara. Sehingga secara sadar, Polisi Kerajaan dan Tentara Kerajaan yang awalnya saling serang langsung berhenti tanpa adanya perintah. Walaupun Dr. Rango Yatmerak selaku Pemangku Adat meninggal, tak ada permintaan maaf ataupun ucapan bela sungkawa dari Raja Wiranagara. Nama baik ayah Timmy dan sekeluarga pun kembali baik berkat narasi yang disebarakan Fredo. Cerita ditutup dengan suasana yang abu-abu, di mana batas antara yang benar dan yang salah tidak pernah benar-benar terjawab secara jelas. Pesan moral ditekankan bahwa di dunia yang dipenuhi kebohongan dan kebencian, orang jujur tetap ada walau sulit ditemukan.

Tabel 2.2 Analisis Skematik

Skema	
Penyituasian	Memperkenalkan tokoh serta latar tempat di Distrik Neang. Menceritakan bahwa kehidupan awal mereka biasa saja sampai akhirnya sang ayah terseret skandal besar sehingga mengubah pandangan masyarakat terhadap keluarga Timmy.
Pemunculan Konflik	Timmy mengaktifkan <i>micro SD</i> rahasia ayah sehingga memancing Tentara Kerajaan menangkap Timmy dan keluarganya. Pada akhirnya Timmy dapat diselamatkan oleh Prof. Terang dan Timmy bergabung dengan komunitas propaganda Prof. Terang tanpa adanya orientasi, tanda tangan pakta integritas, atau mengikuti alur penerimaan karyawan baru sehingga membuat karyawan Prof. Terang tidak mempercayai Timmy.
Peningkatan Konflik	Timmy menjadi pengkhianat dalam komunitas Prof. Terang dan nekat pergi ke Istana sebelum hari Bebas Bicara karena menyadari jika janji untuk menyelamatkan ayah hanya omong kosong Prof. Terang dan anggotanya. Selain itu juga ditemukan pengkhianat dan rencana propaganda Prof. Terang sudah diketahui oleh pihak musuh yaitu kerajaan.
Klimaks	Bebas Bicara menjadi hari paling kacau, Tentara dan Kepolisian Kerajaan saling serang. Rakyat saling mengadu domba, hingga melakukan demonstrasi di Istana Kerajaan.
Penyelesaian	Hari Bebas Bicara ditutup dan semua pertengkaran usai, seperti tidak pernah ada kekacauan sebelumnya. Raja Wiranaga telah lengser dari kepemimpinannya dan Pemangku Adat meninggal. Masyarakat merasa lega tak ada tekanan dan rasa takut intimidasi dari pihak penguasa.

C. Struktur Mikro

(1) Semantik

Semantik merupakan makna yang ingin ditekankan penulis dalam sebuah teks. Ditemukan 91 data dari kelima elemen semantik yang menunjukkan marginalisasi.

a. Latar sebagai Representasi Kontrol Kekuasaan

Latar merupakan salah satu aspek dalam suatu wacana yang dapat memengaruhi semantik atau makna yang ingin disampaikan. Pada umumnya latar ditampilkan di awal untuk menentukan ke arah mana makna teks dibawa memengaruhi masyarakat, untuk pro atau kontra terhadap sesuatu (Eriyanto, 2011, hlm. 235). Menurut Fania (2024), latar dalam semantik Van Dijk terbagi menjadi latar waktu, latar suasana dan latar tempat. Oleh karena itu, latar teks dapat digunakan untuk mengetahui maksud yang ingin disampaikan serta memahami situasi yang melatarbelakangi tindakan tokoh.

Data 1/5/32:

“Hei. Jangan berkata kasar! Kamu bisa ditangkap. **Ini belum hari bebas bicara!**”

“Aku tak peduli!” bentak Ulung. Sebuah CCTV menangkap dan memperbesar tampilan wajahnya.

Kutipan tersebut mengatur perilaku dan ucapan masyarakat melalui aturan bahwa akan ada waktu khusus untuk berbicara kasar, yaitu di Hari Bebas Bicara. Hal ini menunjukkan latar waktu bahwa belum saatnya berbicara sembarangan, didukung dengan pengawasan CCTV yang dapat menyorot dan memperbesar wajah masyarakat yang dinilai melanggar peraturan, yang mana aturan untuk tidak berkata kasar disertai ancaman penangkapan memperlihatkan kekuasaan yang dapat mengendalikan masyarakat melalui aturan.

Selain itu, adanya istilah “hari bebas bicara” memperlihatkan bahwa masyarakat hanya diberikan waktu satu tahun sekali untuk bebas bicara apa pun tanpa takut ditangkap, sehingga di luar waktu tersebut masyarakat harus membatasi pendapat ataupun tindakannya. Kondisi tersebut mencerminkan bentuk marginalisasi politik, tampak dari terbatasnya ruang kebebasan berpendapat, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu, namun dalam konteks ini justru dikontrol dan dibatasi oleh otoritas yang berkuasa.

Data 1/1/3:

“Jangankan menyapa burung jelek itu, manusia menyapa manusia lainnya saja tak ada. Orang-orang takut karena gerak-gerik mereka terekam CCTV. Langsung terpantau di Istana Kerajaan.”

Penulis menggambarkan masyarakat yang hidup dengan penuh kekhawatiran serta interaksi sosial yang terbatas karena adanya pengawasan yang kuat dari penguasa berupa CCTV yang terhubung langsung dengan Istana Kerajaan. Latar suasana ini menunjukkan adanya kontrol kekuasaan yang terus memantau perilaku masyarakat agar tetap patuh pada kebijakan yang berlaku.

Sehingga kutipan latar tersebut bertujuan memengaruhi masyarakat untuk kontra terhadap pemerintah, sebab kebijakan pemerintah membuat masyarakat tertekan dalam kehidupan sehari-hari dan minim empati. Dalam konteks marginalisasi, kondisi ini termasuk dalam marginalisasi politik, yang mana masyarakat tidak dapat berkomunikasi secara bebas di ruang terbuka karena tidak memiliki pengaruh serta adanya dominasi kekuasaan dari pemerintah.

Data 37/312/2:

“Ia tahu pulau itu adalah penjara. Tempat orang-orang yang selama ini dikira hilang, atau terbunuh, dikumpulkan. Di sana, para tahanan itu tak punya kesempatan untuk kabur ke Dunia Luar karena memang sangat jauh walaupun mereka sanggup berenang.”

Kutipan data tersebut menunjukkan pulau sebagai penjara tersembunyi dan menjadi tempat pembuangan orang-orang yang diketahui hilang atau terbunuh. Penggunaan latar tempat ini seakan menunjukkan adanya manipulasi informasi serta praktik penghilangan manusia secara paksa. Hal ini memperkuat gambaran dominasi politik, yang mana kekuasaan mampu menentukan siapa yang tetap berada dalam sistem sosial dan siapa yang harus disingkirkan.

Kondisi ini dapat menggambarkan masyarakat yang terpinggirkan karena kualitas, yang mana masyarakat yang tidak memenuhi kualitas layak untuk mendukung kepentingan sebuah negara maka akan ditiadakan. Praktik ini termasuk dalam marginalisasi politik, ketika ruang sosial digunakan sebagai alat mengontrol, membatasi, mengawasi, dan menghilangkan individu atau kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa latar dalam wacana tidak hanya sebagai penunjuk tempat, suasana, ataupun waktu, tetapi juga dapat digunakan untuk merepresentasikan kontrol kekuasaan yang membatasi kebebasan masyarakat. Temuan tersebut tampak pada kutipan yang menggambarkan kondisi masyarakat yang hidup dalam pengawasan ketat melalui CCTV, pembatasan komunikasi, hingga adanya pulau terasing sebagai penjara tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa latar berfungsi untuk

menegaskan dominasi politik, di mana penguasa memiliki kendali penuh dalam menentukan keberadaan individu dalam struktur sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sajian (2024) dan Saputro (2025) dalam penelitiannya yang mengungkapkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara kelompok elite dan masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini, kelompok elite baik di bidang politik maupun ekonomi memiliki peluang yang besar untuk memengaruhi kebijakan politik, sedangkan kelompok masyarakat yang terpinggirkan mengalami keterbatasan dalam partisipasi politik serta akses terhadap sumber daya ekonomi.

Pengawasan yang ketat ini tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis masyarakat, seperti munculnya rasa takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir bertentangan dengan kepentingan pemerintah (Solove, 2011, hlm.2). Kondisi masyarakat yang hidup dalam pengawasan dan ketakutan dalam teks ini mencerminkan fenomena chilling effect yang diangkat dalam latar belakang penelitian, di mana individu memilih untuk membatasi diri dalam menyampaikan pendapat karena adanya ancaman atau konsekuensi tertentu dari penguasa.

Selain itu, pembatasan kebebasan berbicara yang direpresentasikan melalui konsep “hari bebas bicara” menunjukkan bahwa hak berpendapat tidak diberikan secara utuh dan tidak dapat diungkapkan setiap hari, melainkan dikontrol oleh negara. Sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang, bahwa kekuasaan dapat menentukan siapa yang boleh bicara dan dalam kondisi apa pendapat dapat disampaikan. Sebagaimana yang ditemukan Umar (2025) dalam penelitiannya bahwa peminggiran ini termasuk dalam marginalisasi politik,

sebab sistem birokrasi dan kekuasaan hanya akan berpihak pada kelompok tertentu dan tidak akan berpihak pada masyarakat kecil.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Van Dijk dalam Eriyanto (2011, hlm.235) yang menyatakan bahwa latar dalam wacana berfungsi untuk mengarahkan makna dan memengaruhi sikap pembaca terhadap suatu isu. Dalam hal ini, latar digunakan untuk membangun kecenderungan sikap kontra terhadap pemerintah dengan menampilkan kondisi masyarakat yang tertekan dan tidak bebas. Sejalan dengan hal tersebut, latar yang menampilkan pengawasan, pembatasan komunikasi, hingga penghilangan individu menunjukkan adanya praktik marginalisasi politik yang dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap masyarakat.

b. Detail sebagai Penguat Stigma dan Diskriminasi

Elemen detail merupakan salah satu strategi penulis untuk menunjukkan keberpihakannya secara tersirat. Penulis akan menampilkan informasi secara detail dan terperinci jika itu menguntungkan, dan sebaliknya, fakta yang tidak menguntungkan juga tidak akan dijelaskan secara detail. Hal ini sengaja dilakukan untuk memengaruhi masyarakat terhadap citra tertentu yang diciptakan penulis (Eriyanto, 2011, hlm. 238). Menurut Humaira (2018, hlm.38) detail dalam semantik Van Dijk terbagi menjadi dua, yakni detail panjang yang digunakan untuk menekankan makna tertentu dan detail pendek untuk mengurangi penekanan terhadap suatu peristiwa.

Dengan demikian, detail dapat memperkuat citra positif atau negatif terhadap individu maupun kelompok. Dalam konteks marginalisasi, Janice Perlman menyatakan bahwa pelabelan negatif dan penekanan ciri tertentu

menjadi langkah utama dalam proses peminggiran sosial. Hal ini dapat terbentuk melalui konstruksi citra negatif yang terus-menerus dilekatkan pada kelompok atau individu.

Data 1/4/21:

“Timmy dengan sudut mata melihat **ekspresi wajah Ibu. Tak lagi seperti manusia hidup**, tak pernah terbayang oleh pemuda dua puluh tiga tahun itu harus menjadi pemimpin keluarga, yang hidup di bawah **hujan hujatan** setiap hari. Pokoknya, melihat keluarga ini semua orang pasti **jijik dan marah. Padahal yang membuat kesalahan bukan mereka, melainkan Ayah.**”

Kutipan kalimat tersebut memperlihatkan detail panjang untuk menekankan bahwa kesalahan satu orang bisa berdampak pada keluarganya, detail ini juga memperinci tekanan psikologis yang dialami tokoh, seperti frasa “tak lagi seperti manusia hidup” dan “hidup di bawah hujan hujatan setiap hari”. Selain itu, kalimat “semua orang pasti langsung jijik dan marah” menunjukkan adanya penolakan masyarakat secara menyeluruh, seolah-olah tidak ada ruang bagi keluarga Timmy untuk diterima kembali. Berdasarkan hal tersebut, kutipan ini termasuk dalam marginalisasi sosial karena keluarga Timmy dikucilkan bahkan diperlakukan tidak baik atas kesalahan orang lain.

Data 2/11/3:

“Ini gerbong **kelas rendah, paling murah, paling apek dan bau keringat, tidak ada tempat duduk**. Meski begitu, ini juga satu-satunya tempat yang orang-orangnya jarang menatap sinis pada Timmy dan Ibu.”

Penggunaan detail pendek seperti “paling murah”, “paling apek”, dan “bau keringat” secara jelas membangun citra negatif terhadap kelompok masyarakat kelas bawah tanpa penjelasan lebih lanjut alasan dari keadaan tersebut. Dalam analisis Van Dijk, detail seperti ini menunjukkan bagaimana

penulis menonjolkan detail ketidaknyamanan dan keterbelakangan untuk membentuk persepsi pembaca akan negara yang tidak memfasilitasi masyarakat miskin dengan baik dan merata. Kondisi ini termasuk bagian dari marginalisasi ekonomi, karena menunjukkan adanya pembagian kelas sosial berdasarkan ekonomi masyarakat.

Data 33/272/1:

“Di ruangan lain, petugas saling berbisik. **“Tidak otaknya saja sekalian? Terakhir kali kita melakukan ini pada nenek psikolog gila itu. Sudah kita ubah bentuknya, masih saja bisa bersuara! Masuk TV pula!”**

“Tak akan ada yang percaya dengan orang gila yang terlalu miskin.” Petugas lainnya memencet-mencet tombol lainnya lagi. **“Begitu juga dengan orang gila yang terlampau kaya.”**

Dalam kutipan dialog tersebut detail dijelaskan secara panjang dan eksplisit akan adanya praktik manipulasi wajah hingga suara pada individu yang mengetahui banyak hal negatif tentang kerajaan, Individu tersebut akan diubah menjadi wajah orang yang dikenal gila atau miskin di negara tersebut. Istilah “orang gila” dan “terlalu miskin” menjadi detail yang secara langsung membuat tokoh terlihat buruk.

Dalam perspektif Van Dijk, penggunaan istilah “orang gila” dan “miskin” tidak hanya merendahkan, tetapi juga merugikan dengan melemahkan kepercayaan individu di mata masyarakat sehingga layak untuk dipinggirkan. Kondisi ini termasuk dalam marginalisasi sosial, karena adanya pelabelan “orang gila” dan “miskin” menjadi stigma yang menyebabkan individu yang memiliki informasi penting menjadi tidak layak dipercaya dan terpinggirkan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa elemen detail dalam wacana dapat digunakan sebagai strategi untuk memperkuat stigma dan membentuk citra negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Detail tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi, tetapi juga sebagai alat ideologis untuk menonjolkan aspek-aspek yang merugikan tokoh sehingga memengaruhi persepsi pembaca.

Temuan tersebut tampak pada penggambaran kondisi keluarga Timmy yang dipenuhi tekanan sosial karena stigma negatif yang dilekatkan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh perspektif Erving Goffman (1963, hlm.2) yang menjelaskan bahwa stigma muncul ketika masyarakat mengategorikan individu atau kelompok pada atribut yang menurunkan nilai sosialnya. Dalam konteks ini, keluarga Timmy mengalami *spoiled identity* atau identitas ternoda, di mana masyarakat memberi identitas negatif yaitu “keluarga penipu” hanya karena satu kesalahan ayah. Akibatnya, identitas lain yang sebenarnya positif, seperti kemampuan Timmy sebagai asisten dosen atau keahlian Ibunya sebagai ahli racun terbaik, menjadi terabaikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa individu tidak lagi dipandang sebagai pribadi yang utuh, tetapi dipandang sebagai representasi dari stereotip yang dilekatkan oleh masyarakat. Sejalan dengan penelitian Harzeina (2025) dan Ulya (2021) yang menunjukkan bahwa penekanan stigma marginalisasi akan bekerja secara bersamaan dan turun temurun, bahkan dalam kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Dalam konteks ini, yang melekatkan label negatif pada keluarga Timmy adalah masyarakat di sekitar Timmy dengan status sosial yang sama rendahnya.

Stigma yang terus-menerus dilekatkan akan memengaruhi perilaku individu. Keluarga Timmy menyadari bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan dinilai oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak, sehingga secara tidak langsung mendorong untuk mengontrol perilaku mereka sendiri secara berlebihan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Zubair dan Sudrajat (2023) menyatakan bahwa kondisi ini membuat individu merasa selalu diawasi, sehingga secara otomatis membatasi tindakan dan ekspresinya.

Penggunaan detail tertentu menunjukkan adanya upaya peminggiran melalui bahasa, di mana penulis tidak hanya menyatakan adanya penolakan, tetapi juga menyertakan gambaran nyata seperti tatapan sinis, hinaan, dan perlakuan yang merendahkan untuk menguntungkan pihak penguasa (Nadifa & Indayani, 2025). Adanya detail-detail ini memperlihatkan bahwa marginalisasi dalam kehidupan sosial tidak selalu dalam tindakan, tetapi juga dapat melalui ekspresi nonverbal seperti gestur, tatapan, dan sikap yang berulang (Baker, 2025).

Dalam perspektif Van Dijk, detail tersebut berfungsi untuk menonjolkan informasi yang merugikan tokoh sehingga membentuk persepsi pembaca terhadap identitas mereka yang negatif. Sementara itu pelabelan “keluarga penipu” atau “orang gila” merupakan bentuk stigma sosial yang menyebabkan individu dipinggirkan bukan karena tindakan mereka tetapi karena identitas yang dilekatkan oleh masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang diangkat dalam latar belakang penelitian, yaitu adanya pembatasan ruang sosial dan pembentukan persepsi publik melalui bahasa. Stigma yang dilekatkan terus menerus akan membuat individu menarik

diri dari lingkungan sosial dan cenderung membatasi diri karena takut mendapatkan label negatif atau perlakuan diskriminatif dari masyarakat.

c. Maksud Tersirat sebagai Kritik terhadap Sistem Politik

Hampir sama dengan detail, elemen maksud dalam semantik akan menguraikan informasi yang menguntungkan bagi penulis secara eksplisit, jelas, dengan kata tegas, dan langsung menunjuk pada fakta. Sementara informasi yang merugikan akan ditulis secara implisit, samar, dan berbelit-belit (Eriyanto, 2011, hlm. 240). Berikut maksud yang ditemukan dalam novel Bungkam Suara.

Data 12/109/6:

“Kita mau Hari Bebas Bicara itu ada setiap hari. Tidak perlu hanya sekali setahun. Itulah yang membuat Kerajaan takut. Orang-orang harus bebas menyampaikan apa saja yang mereka mau sampaikan. Itu malah akan membantu kita dalam pengelolaan berbangsa bernegara. Ada sistem *check and balance*.”

Berdasarkan kalimat tersebut, kutipan “membuat Kerajaan takut” penulis secara implisit menyatakan bahwa kerajaan bersifat otoriter dan penguasa merasa terancam oleh kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam perspektif Van Dijk, hal ini menunjukkan penggunaan maksud tersirat, di mana kritik yang merugikan kerajaan disampaikan secara implisit melalui dialog tokoh. Sementara itu, menurut Janice Perlman, pembatasan kebebasan berpendapat merupakan bentuk marginalisasi politik, karena masyarakat tidak memiliki akses yang setara Kerajaan untuk menyampaikan pendapat mereka.

Data 2/17/1:

“Pejabat korup itu adalah mantan menteri di Kementerian Seluruh Ekosistem, Selat, Laut, dan Hutan, atau kalau disingkat, KESELEKSETAN. Pejabat itu tertangkap, terbuka tabir kasus korupsinya di Hari Bebas Bicara dua tahun lalu. Dan memang menjadi salah satu video andalan untuk disebar ke seantero

NKAL. Propaganda menebar ketakutan supaya tak ada lagi pejabat yang berani macam-macam.”

Penggunaan kata “propaganda” dan “menebar ketakutan” mengandung maksud tersirat bahwa sistem kekuasaan sengaja menciptakan rasa takut untuk mengendalikan perilaku individu, khususnya pejabat. Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum yang disampaikan secara langsung untuk menguntungkan pihak penguasa agar masyarakat mudah dikendalikan dan tunduk pada aturan. Kondisi ini mencerminkan marginalisasi politik, di mana masyarakat tidak dapat membantah jika hukuman yang ditentukan penguasa terlalu kejam, sebab masyarakat tidak memiliki akses pada penguasa.

Data 25/218/3:

“Dua Tentara Kerajaan menjemput Taly dan dua adiknya. Mereka dibawa pihak Istana menuju sebuah tempat. Di sana, berkumpul ratusan anak-anak dan remaja. Taly tak tahu itu tempat apa. Mereka tak disiksa. Tak ada kejahatan. **Malah mereka mendapat pendidikan, makanan yang baik, tempat tidur yang hangat.** Kemudian hari, setelah beranjak dewasa, Taly tahu bahwa anak dan remaja yang ada di sini, **berasal dari keluarga yang pernah memberontak, atau memiliki ketidaksetujuan pada pihak Kerajaan.** Apa yang ia kira selama ini pendidikan, ternyata cuci otak.”

Kalimat ini mengandung maksud tersirat yang kuat, penggunaan istilah “cuci otak” menjadi menunjukkan bahwa sistem kekuasaan berusaha mengontrol pola pikir individu dan memanipulasi pikiran melalui pendidikan. Dalam perspektif Van Dijk, hal ini merupakan bentuk maksud tersirat karena kritik yang merugikan citra Kerajaan disampaikan secara implisit di balik pernyataan tersebut. Sementara itu, menurut Janice Perlman, praktik seperti ini termasuk bentuk marginalisasi politik, karena negara hanya memfasilitasi kelompok yang berasal dari keluarga yang memberontak Kerajaan, namun fasilitas tersebut pada

akhirnya dikendalikan secara ideologis demi kepentingan negara sehingga kelompok tersebut kehilangan kebebasan untuk berpikir.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa elemen maksud dalam wacana digunakan sebagai strategi untuk menyampaikan kritik terhadap sistem politik secara tersirat. Penulis menyampaikan kritik secara tidak langsung melalui dialog, narasi, dan alur cerita sehingga pembaca harus menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui cara ini, penulis juga menunjukkan bahwa peminggiran tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui pembatasan ekspresi dan pengendalian pada pola pikir masyarakat

Hal ini memperkuat perspektif analisis wacana kritis yang menempatkan bahasa sebagai alat kekuasaan (Ratnaningsih, 2019, hlm.20). Penyampaian kritik secara implisit menunjukkan bahwa wacana tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk mengubah pola pikir melalui strategi propaganda dan pengendalian ideologi. Sejalan dengan penelitian Putri (2025) yang menunjukkan bahwa propaganda menjadi salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Sementara itu Prasetyo (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengawasan ketat, ketidakadilan dalam penegakan hukum, pembatasan kebebasan berbicara, dan kekuasaan yang absolut dimiliki oleh Raja dan aparat pemerintah mencerminkan dominasi penuh atas masyarakat.

Hal ini sesuai dengan maksud tersirat dalam teks yang menggambarkan masyarakat secara tidak langsung diarahkan untuk tetap patuh melalui sistem pengawasan dan pembatasan yang terus-menerus. Temuan ini sejalan dengan teori Van Dijk dalam Eriyanto (2011) yang menyatakan bahwa maksud dalam

wacana digunakan untuk menyampaikan informasi baik secara eksplisit maupun implisit, sesuai dengan kepentingan tertentu.

Dalam konteks ini, kritik terhadap kekuasaan cenderung disampaikan secara implisit untuk menghindari penyampaian yang terlalu frontal. Kondisi ini mencerminkan fenomena yang diangkat dalam latar belakang penelitian, yaitu adanya keterbatasan kebebasan berekspresi dalam praktik demokrasi. Kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks menunjukkan bahwa penyampaian pendapat secara langsung berpotensi menimbulkan konsekuensi tertentu, sehingga kritik berubah menjadi terselubung.

d. Praanggapan

Elemen wacana semantik praanggapan digunakan untuk mendukung makna suatu teks dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Premis tersebut akan menentukan dan memengaruhi masyarakat untuk mendukung suatu peristiwa. Pada umumnya, praanggapan merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya tetapi tetap masuk akal dan logis, sehingga meskipun belum terbukti kenyataannya tidak akan dipertanyakan kebenarannya, karena orang sudah terlanjur menerimanya (Eriyanto, 2011, hlm.256).

Data 19/171/1:

“Tiap tahun kita diberikan kesempatan untuk merasakan, bahwa **hukum tidak lagi tumpul ke bawah**. Rakyat bisa menjadi pengadil tanpa harus takut konsekuensi hukum.”

Pada kutipan tersebut, praanggapan muncul melalui frasa "tidak lagi" tersebut mengandaikan bahwa hukum yang berlaku sebelumnya memang "tumpul ke bawah". Dengan kata lain, teks membangun asumsi bahwa pernah terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan masyarakat kelas bawah. Informasi

mengenai ketimpangan hukum tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi diterima sebagai pengetahuan bersama yang tidak perlu dibuktikan kembali. Hal ini sesuai dengan teori praanggapan dalam teori Van Dijk, yaitu menghadirkan suatu premis sebagai sesuatu yang telah dianggap benar.

Selain itu, kalimat "Rakyat bisa menjadi pengadil tanpa harus takut konsekuensi hukum" juga mengandung asumsi implisit bahwa sebelumnya masyarakat berada dalam kondisi takut atau tidak memiliki kebebasan untuk menyuarakan penilaian terhadap sesuatu. Narasi tersebut membangun oposisi antara masa lalu yang dipersepsikan tidak adil dan masa kini yang digambarkan lebih berpihak kepada rakyat. Data tersebut merepresentasikan marginalisasi politik. Kehadiran frasa "hukum tidak lagi tumpul ke bawah" menunjukkan adanya pengakuan bahwa kelompok masyarakat bawah pernah menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik penegakan hukum.

Dengan kata lain, teks secara tidak langsung mengakui keberadaan relasi kuasa yang tidak setara antara kelompok berkuasa dan kelompok masyarakat biasa. Kelompok bawah diposisikan sebagai pihak yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, narasi tersebut memperlihatkan adanya marginalisasi yang kemudian dikonstruksikan telah berhasil diatasi oleh sistem yang berlaku saat ini.

Data 1/6/6:

“Tak ada sekolah lagi yang mau menerima Ulung **sejak** Ayah mereka jadi kriminal tingkat tinggi.”

Pada kutipan tersebut terdapat unsur praanggapan yang ditandai oleh penggunaan kata "lagi". Kehadiran kata tersebut mengandaikan bahwa sebelum ayah Ulung berstatus sebagai kriminal tingkat tinggi, masih terdapat sekolah yang

bersedia menerima Ulung sebagai peserta didik. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak hanya menyampaikan kondisi saat ini, tetapi juga menyisipkan premis bahwa sebelumnya akses pendidikan bagi Ulung masih terbuka.

Dalam perspektif Van Dijk, praanggapan berfungsi untuk menghadirkan suatu informasi seolah-olah telah diketahui dan diterima sebagai kebenaran oleh pembaca. Teks tidak menjelaskan secara rinci alasan setiap sekolah menolak Ulung, melainkan langsung membangun asumsi bahwa perubahan status sosial ayahnya menjadi penyebab yang dapat diterima begitu saja. Melalui strategi ini, pembaca diarahkan untuk memahami penolakan tersebut sebagai konsekuensi yang dianggap wajar. Selain itu, penggunaan frasa "sejak Ayah mereka jadi kriminal tingkat tinggi" menunjukkan hubungan sebab-akibat yang implisit. Narasi mengonstruksi identitas Ulung berdasarkan identitas ayahnya. Akibatnya, individu yang tidak melakukan kesalahan justru menerima dampak sosial dari tindakan anggota keluarganya.

Kutipan tersebut menunjukkan bentuk marginalisasi sosial karena tokoh Ulung mengalami pengucilan dalam bidang pendidikan akibat stigma sosial yang melekat pada keluarganya. Penolakan sekolah bukan didasarkan pada kemampuan akademik atau perilaku Ulung, melainkan pada status ayahnya sebagai kriminal. Dalam konteks ini, pendidikan yang seharusnya menjadi ruang inklusif berubah menjadi mekanisme eksklusi sosial. Tokoh ditempatkan sebagai kelompok yang tidak layak diterima karena identitas keluarganya. Kondisi tersebut memperlihatkan bagaimana stigma sosial dapat membatasi akses individu terhadap hak-hak sosial yang semestinya diperoleh secara setara.

Temuan mengenai praanggapan pada kedua data menunjukkan bahwa teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun cara pandang tertentu terhadap realitas sosial. Melalui praanggapan, penulis dapat menyisipkan asumsi yang diterima pembaca tanpa banyak dipertanyakan. Pada data pertama, praanggapan digunakan untuk membangun narasi mengenai perubahan kondisi hukum dari yang sebelumnya tidak adil menjadi lebih adil. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa praanggapan berfungsi sebagai sarana pembentukan makna sosial dan relasi kekuasaan dalam teks. Sementara pada data kedua, praanggapan digunakan untuk memperkuat stigma sosial terhadap keluarga pelaku kriminal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriyawati & Hudiyono (2023) yang menemukan bahwa unsur semantik dalam model Van Dijk digunakan untuk menekankan makna tertentu sehingga pembaca diarahkan pada pemahaman tertentu mengenai suatu peristiwa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek semantik tidak bersifat netral, melainkan dapat digunakan untuk memengaruhi cara pembaca memandang isu sosial yang dibahas. Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Ranti, (2024) mengenai pemberitaan perundungan di Tempo.co. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa elemen-elemen mikro dalam wacana Van Dijk berperan dalam membentuk cara pembaca memahami kelompok tertentu dan persoalan sosial yang diangkat dalam teks. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan perspektif sosial.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Ramadhan & Zulfikarni (2023) yang menegaskan bahwa analisis wacana Van Dijk dapat mengungkap praktik kekuasaan dan akses dalam teks sastra. Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa suatu kelompok dapat direpresentasikan secara berbeda melalui pilihan bahasa tertentu, sehingga muncul konstruksi mengenai siapa yang memiliki kuasa dan siapa yang berada pada posisi yang lebih lemah. Kondisi tersebut tampak pada tokoh Ulung yang mengalami eksklusi sosial serta pada representasi masyarakat bawah dalam sistem hukum.

Berdasarkan kedua data tersebut praanggapan digunakan pengarang untuk menghadirkan informasi tertentu sebagai sesuatu yang telah diterima kebenarannya. Pada data pertama, strategi tersebut digunakan untuk membangun narasi mengenai ketimpangan hukum yang pernah dialami masyarakat bawah.. Pada data kedua, strategi yang sama menghasilkan representasi marginalisasi sosial melalui stigma terhadap keluarga kriminal. Sehingga, praanggapan tidak hanya berfungsi sebagai unsur semantik, tetapi juga menjadi sarana untuk mereproduksi dan mengonstruksi realitas sosial dalam teks sesuai dengan kepentingan makna yang ingin ditekankan pengarang.

e. Nominalisasi

Menurut Van Dijk, nominalisasi yakni mengubah suatu tindakan atau peristiwa menjadi kata benda, sehingga tindakan atau peristiwa tersebut tidak akan terlihat secara jelas.

Data 13/117/5:

“Yang hingga sekarang kami belum tahu adalah, siapa orang di belakangnya, apa motivasinya, dan untuk apa uangnya. **Pencurian** uang besar-besaran terakhir di NKAL itu terjadi dua puluh tahun lalu.”

Pada kutipan tersebut, kata pencurian merupakan bentuk nominalisasi dari verba mencuri. Secara gramatikal, perubahan ini menggeser fokus kalimat dari tindakan yang dilakukan seseorang menjadi sebuah peristiwa yang seolah-

olah berdiri sendiri. Akibatnya, pembaca hanya memperoleh informasi bahwa telah terjadi pencurian dalam jumlah besar, tetapi tidak memperoleh informasi mengenai siapa pelaku tindakan tersebut.

Jika kalimat tersebut ditulis dalam bentuk verbal, misalnya "Aparat mencuri uang dalam jumlah besar dua puluh tahun lalu", maka perhatian pembaca akan langsung tertuju pada pelaku. Namun, melalui nominalisasi "pencurian" pelaku menjadi tidak terlihat dan peristiwa lebih menonjol daripada aktor yang bertanggung jawab. Dalam kerangka analisis wacana kritis Van Dijk, hal ini dapat dipahami sebagai strategi tekstual yang mengaburkan tanggung jawab sosial atas suatu tindakan.

Data ini dapat dikategorikan sebagai marginalisasi ekonomi. Hal tersebut karena wacana berpusat pada hilangnya sumber daya ekonomi berupa uang dalam jumlah besar, sementara pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut tidak dimunculkan dalam teks. Dengan demikian, perhatian pembaca diarahkan pada kerugian ekonomi yang terjadi, bukan pada individu atau kelompok yang menyebabkan kerugian tersebut. Akibatnya, posisi pelaku menjadi relatif terlindungi dari sorotan pembaca.

Data 8/64/3:

"Satu tahun NKAL berjalan, masyarakat mulai berisik dan merasa sistem kerajaan ini tidak adil. Rakyat ingin juga jadi raja. Tentu saja ini mendapat **penolakan.**"

Kata penolakan merupakan nominalisasi dari verba menolak. Pada kalimat tersebut tidak dijelaskan siapa pihak yang melakukan tindakan menolak. Pembaca hanya mengetahui bahwa terdapat penolakan terhadap keinginan rakyat untuk menjadi raja, tetapi tidak mengetahui secara eksplisit pihak yang menolak

tuntutan tersebut. Secara tekstual, nominalisasi ini mengubah tindakan sosial yang dilakukan oleh aktor tertentu menjadi sebuah keadaan atau peristiwa yang tampak netral. Jika kalimat tersebut ditulis dalam bentuk verbal, misalnya "Pihak kerajaan menolak tuntutan rakyat", maka relasi kuasa antara kerajaan dan rakyat akan terlihat jelas. Akan tetapi, penggunaan kata penolakan menyebabkan aktor dominan dalam struktur kekuasaan tidak tampak dalam permukaan teks.

Dalam perspektif Van Dijk, strategi semacam ini dapat berfungsi untuk mengurangi visibilitas kelompok yang memiliki kekuasaan. Tanggung jawab atas tindakan penolakan menjadi kabur karena yang ditonjolkan adalah keberadaan peristiwa penolakan itu sendiri. Data ini termasuk marginalisasi politik karena berkaitan dengan pembatasan partisipasi rakyat dalam sistem kekuasaan. Tuntutan rakyat tidak memperoleh ruang yang setara, sementara pihak yang memiliki otoritas untuk menolak tuntutan tersebut justru tidak disebutkan secara eksplisit. Akibatnya, relasi dominasi antara penguasa dan rakyat menjadi kurang terlihat dalam teks.

Temuan mengenai nominalisasi pencurian dan penolakan menunjukkan bahwa teks cenderung memusatkan perhatian pada peristiwa, sementara aktor yang terlibat di balik peristiwa tersebut disamarkan. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Indriyawati & Hudiyono (2023) yang menganalisis pemberitaan mengenai pencucian uang pejabat menggunakan model Van Dijk. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa unsur semantik dan sintaksis dalam teks berita digunakan untuk menonjolkan isu tertentu sekaligus membangun cara pandang pembaca terhadap peristiwa yang diberitakan. Dengan kata lain, pilihan bentuk

bahasa berperan penting dalam mengarahkan perhatian pembaca pada aspek tertentu dari sebuah peristiwa.

Selain itu, penelitian terdahulu Winingsih dkk., (2022) mengenai isu pelemahan KPK dalam pemberitaan Narasi Newsroom juga menunjukkan bahwa pilihan struktur bahasa dalam teks dapat membentuk representasi kekuasaan dan tanggung jawab sosial. Analisis Van Dijk dalam penelitian tersebut menemukan bahwa konstruksi wacana tertentu mampu mengarahkan pembaca pada interpretasi tertentu terhadap aktor dan peristiwa yang diberitakan. Penelitian Dewi dkk., (2025) mengenai pidato politik Presiden RI yang menunjukkan bahwa strategi semantik dalam model Van Dijk digunakan untuk membangun legitimasi, mengarahkan fokus pembaca, dan menyesuaikan pesan dengan kepentingan sosial tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa pemilihan bentuk bahasa bukanlah tindakan netral, melainkan bagian dari strategi pembentukan makna dalam wacana.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa nominalisasi pencurian dan penolakan tidak hanya berfungsi sebagai perubahan bentuk kata dari verba menjadi nomina, tetapi juga sebagai strategi wacana yang menggeser perhatian pembaca dari aktor menuju peristiwa. Pada data pencurian, penghilangan aktor menghasilkan kecenderungan marginalisasi ekonomi karena pihak yang bertanggung jawab atas kerugian ekonomi tidak ditampilkan. Sementara itu, pada data penolakan, penghilangan aktor memperkuat marginalisasi politik karena pihak yang memiliki kekuasaan untuk menolak aspirasi rakyat tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian, kedua data menunjukkan bahwa nominalisasi berperan dalam menyamarkan relasi kuasa dan

tanggung jawab sosial, sehingga sejalan dengan pandangan Van Dijk bahwa struktur mikro teks dapat digunakan untuk merepresentasikan sekaligus menyembunyikan praktik dominasi penguasa dalam wacana.

(2) Sintaksis

Sintaksis merupakan unsur yang menunjukkan terkait susunan kalimat yang digunakan penulis untuk menggiring opini pembaca. Ditemukan 33 data dari ketiga elemen sintaksis yang menunjukkan marginalisasi.

a. Bentuk Kalimat sebagai Strategi Marginalisasi

Bentuk kalimat yaitu menunjukkan kalimat dalam suatu teks menggunakan kalimat aktif atau pasif. Berdasarkan analisis ditemukan sembilan bentuk kalimat yang mengarah pada marginalisasi.

Data 3/23/2:

Ayah Timmy melakukan kejahatan tingkat tinggi! Merugikan banyak orang. Maka ia dan keluarganya pun **dimiskinkan**.

Pada data tersebut, aspek sintaksis berupa bentuk kalimat pasif tampak pada penggunaan kata “dimiskinkan”. Dalam perspektif Van Dijk, bentuk kalimat pasif bukan sekadar pilihan tata bahasa, melainkan strategi wacana yang dapat digunakan untuk mengatur fokus perhatian pembaca. Kalimat pasif cenderung menonjolkan pihak yang menerima tindakan, sedangkan pelaku tindakan ditempatkan di posisi yang tidak penting atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Dalam kutipan tersebut, pelaku yang menyebabkan Timmy dan keluarganya menjadi miskin tidak disebutkan secara eksplisit. Sebaliknya, perhatian pembaca diarahkan pada keadaan yang dialami Timmy dan

keluarganya sebagai pihak yang menerima dampak. Dengan demikian, teks lebih menekankan kondisi penderitaan keluarga Timmy dibandingkan proses atau pihak yang bertanggung jawab atas pemiskinan tersebut.

Penggunaan bentuk pasif ini juga membangun kesan bahwa kemiskinan yang dialami keluarga Timmy merupakan sesuatu yang diterima begitu saja sebagai konsekuensi yang tidak dapat ditolak. Akibatnya, pembaca lebih mudah memusatkan perhatian pada posisi keluarga Timmy sebagai objek kebijakan atau hukuman daripada mempertanyakan pihak yang memiliki kuasa sebagai penyebab kondisi tersebut.

Berkaitan dengan marginalisasi, kutipan ini merepresentasikan marginalisasi ekonomi. Keluarga Timmy mengalami penurunan status ekonomi bukan karena tindakan mereka sendiri, melainkan akibat tindakan ayah Timmy. Artinya, keluarga menjadi kelompok yang menerima dampak sosial ekonomi dari keputusan pihak yang memiliki kekuasaan. Wacana ini menunjukkan bagaimana individu dapat terdorong ke posisi yang terpinggirkan secara ekonomi karena hubungan sosial atau keluarga yang dimilikinya. Dengan kata lain, kemiskinan dalam teks tidak hanya berfungsi sebagai kondisi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penghukuman yang memperluas dampak kepada kelompok yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam kesalahan yang dilakukan.

Data 8/64/2:

Sesuai kesepakatan saat NKAL berdiri, enam kerajaan besar ini akan bergantian menjadi raja berikutnya. **Sementara**, kerajaan-kerajaan sdang dan kecil, tak bisa jadi Raja Utama.

Pada data tersebut, aspek sintaksis berupa bentuk kalimat kontras ditunjukkan melalui penggunaan konjungsi “sementara”. Dalam teori Van Dijk,

penempatan proposisi tertentu dalam struktur kalimat dapat digunakan untuk menonjolkan perbedaan, pertentangan, atau ketimpangan antara dua kelompok. Kalimat pertama menampilkan enam kerajaan besar sebagai pihak yang memperoleh hak untuk secara bergantian menduduki posisi Raja Utama. Setelah itu, melalui penggunaan kata “sementara” teks menghadirkan proposisi kedua yang menyatakan bahwa kerajaan sedang dan kecil tidak memiliki kesempatan yang sama. Struktur ini menciptakan oposisi yang jelas antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki akses tersebut.

Penempatan proposisi mengenai kerajaan besar pada bagian awal kalimat membuat hak politik mereka tampak sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Sebaliknya, kerajaan sedang dan kecil ditempatkan pada bagian berikutnya sebagai kelompok yang didefinisikan melalui keterbatasannya, yaitu "tak bisa jadi Raja Utama". Dengan demikian, struktur kalimat tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hierarki sosial politik antara dua kelompok yang berbeda.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya marginalisasi politik. Kerajaan sedang dan kecil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam mekanisme pergantian kekuasaan. Akses terhadap jabatan tertinggi hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, sedangkan kelompok lainnya secara sistematis dikeluarkan dari proses tersebut. Melalui bentuk kalimat kontras, teks memperlihatkan adanya distribusi kekuasaan yang tidak merata dan menempatkan kerajaan kecil serta sedang sebagai kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan utama.

Temuan mengenai penggunaan bentuk kalimat pasif dan bentuk kalimat kontras dalam merepresentasikan marginalisasi sejalan dengan sejumlah penelitian Analisis Wacana Kritis Van Dijk di Indonesia. Penelitian Karmizi dan Gustia (2025) mengenai pemberitaan ijazah palsu Jokowi menunjukkan bahwa struktur mikro, termasuk unsur sintaksis, digunakan untuk membangun cara pandang tertentu terhadap aktor dan relasi kekuasaan dalam teks. Pilihan bentuk kalimat dapat digunakan untuk menonjolkan pihak tertentu sekaligus menyamarkan pihak lain yang memiliki kekuasaan. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini, khususnya pada data “dimiskinkan”, karena pelaku pemiskinan tidak ditampilkan secara eksplisit sementara perhatian diarahkan kepada pihak yang menerima dampak.

Selain itu, penelitian Taofiq dkk., (2026) mengenai pemberitaan kasus penganiayaan anak menemukan bahwa aspek sintaksis dalam model Van Dijk berfungsi untuk menekankan isu penyalahgunaan kekuasaan dan mengarahkan perhatian pembaca pada pihak tertentu. Hasil tersebut memperkuat temuan penelitian ini bahwa bentuk kalimat tidak bersifat netral, melainkan dapat menjadi sarana untuk menonjolkan kelompok dominan dan kelompok yang terdampak oleh kekuasaan.

Temuan mengenai marginalisasi politik pada data kerajaan besar dan kerajaan kecil juga selaras dengan penelitian (Nurhadi & Utami, 2026) yang menemukan bahwa struktur wacana dapat digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan dan memperlihatkan relasi dominasi dalam ruang politik. Dalam penelitian tersebut, bahasa digunakan untuk memperkuat posisi kelompok yang memiliki otoritas sekaligus membentuk penerimaan publik terhadap struktur

kekuasaan yang ada. Hal ini serupa dengan data penelitian ini, di mana kerajaan besar ditempatkan sebagai kelompok yang sah memperoleh kekuasaan, sedangkan kerajaan kecil dan sedang dikonstruksikan sebagai kelompok yang tidak memiliki akses terhadap jabatan tertinggi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa bentuk kalimat dalam struktur mikro Van Dijk tidak hanya berfungsi sebagai unsur kebahasaan, tetapi juga sebagai strategi ideologis untuk membangun relasi kuasa. Bentuk pasif digunakan untuk menonjolkan kelompok yang menerima dampak marginalisasi ekonomi, sedangkan bentuk kalimat aktif digunakan untuk memperlihatkan ketimpangan akses terhadap kekuasaan sehingga menghasilkan marginalisasi politik.

b. Koherensi dalam Penguatan Wacana Marginalisasi

Koherensi merupakan hubungan antar kata atau kalimat untuk menjelaskan hubungan dua fakta yang berbeda. Biasanya menggunakan kata hubung kausal (sebab, akibat), hubungan keadaan, kondisional, perbandingan, dan lain sebagainya. Melalui koherensi ini penulis dapat menyisipkan maksud tersembunyi untuk memengaruhi pemanaan peristiwa kepada khalayak.

Data 2/17/7:

Sebuah rekening misterius entah di mana dan entah siapa yang punya, menampung uang-uang digital itu. Dan hukum menetapkan Ayah Timmy pelakunya. Inilah **penyebab** kenapa keluarga Timmy begitu dibenci.

Pada kutipan tersebut ditemukan penggunaan koherensi kausal yang ditandai dengan kata “penyebab”. Kata tersebut berfungsi menghubungkan peristiwa penetapan Ayah Timmy sebagai pelaku tindak kejahatan dengan kebencian yang diterima keluarganya dari masyarakat. Hubungan sebab akibat yang dibangun dalam kalimat tersebut tidak hanya menjelaskan rangkaian

peristiwa, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk menerima bahwa kebencian terhadap keluarga Timmy merupakan konsekuensi yang wajar dari status hukum sang ayah. Sehingga, koherensi kausal digunakan untuk membentuk pemahaman tertentu mengenai relasi antara kesalahan individu dan penerimaan sosial terhadap keluarganya. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Van Dijk, penggunaan koherensi semacam ini menunjukkan bagaimana struktur mikro teks dapat digunakan untuk membangun makna ideologis yang tampak alamiah dan tidak dipertanyakan oleh pembaca.

Jika dikaitkan dengan marginalisasi, kutipan tersebut menunjukkan adanya marginalisasi sosial yang berakar pada legitimasi hukum. Keluarga Timmy digambarkan menerima penolakan dan kebencian sosial bukan karena tindakan mereka sendiri, melainkan karena keterkaitan mereka dengan individu yang telah diberi label bersalah oleh hukum. Akibatnya, identitas keluarga menjadi melekat dengan stigma kriminalitas yang sebenarnya ditujukan kepada satu orang. Melalui konstruksi tersebut, teks merepresentasikan bagaimana status hukum seseorang dapat meluas menjadi stigma kolektif yang mengucilkan anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, wacana ini memperlihatkan praktik marginalisasi yang terjadi melalui proses pelabelan sosial, di mana kelompok tertentu kehilangan penerimaan sosial akibat asosiasi dengan identitas yang dianggap negatif oleh masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa koherensi kausal dapat berfungsi sebagai sarana legitimasi terhadap praktik pengucilan sosial. Melalui hubungan sebab-akibat yang dibangun secara eksplisit, teks mengarahkan pembaca untuk memahami kebencian masyarakat terhadap keluarga Timmy sebagai sesuatu

yang logis dan dapat diterima. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencerminkan fenomena sosial ketika keluarga pelaku kejahatan sering kali turut menerima stigma dan diskriminasi meskipun tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, hal ini memperkuat penelitian terdahulu Humaini & Haspiani (2025) yang mana teks tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga mereproduksi cara pandang yang dapat memperkuat marginalisasi terhadap kelompok yang telah dilekatkan dengan identitas negatif.

Data 23/203/3:

Dunia Luar justru salah mengira. Mereka menganggap peradaban lama itu kuno. Padahal kecanggihan mereka hari ini tak ada apa-apanya **dibanding** nenek moyang dulu.

Temuan ini menunjukkan bahwa koherensi kausal dapat berfungsi sebagai sarana legitimasi terhadap praktik pengucilan sosial. Melalui hubungan sebab akibat yang dibangun secara eksplisit, teks mengarahkan pembaca untuk memahami kebencian masyarakat terhadap keluarga Timmy sebagai sesuatu yang logis dan dapat diterima. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini mencerminkan fenomena sosial ketika keluarga pelaku kejahatan sering kali turut menerima stigma dan diskriminasi meskipun tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, teks tidak hanya menggambarkan realitas sosial, tetapi juga mereproduksi cara pandang yang dapat memperkuat marginalisasi terhadap kelompok yang telah dilekatkan dengan identitas negatif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa koherensi komparatif dapat digunakan untuk membangun superioritas budaya dan pengetahuan suatu kelompok. Melalui perbandingan yang menempatkan nenek moyang sebagai

pihak yang lebih unggul, teks mengarahkan pembaca untuk meragukan klaim kemajuan yang dimiliki oleh peradaban modern. Dalam penelitian sebelumnya, strategi wacana semacam ini menunjukkan bahwa marginalisasi tidak selalu terjadi melalui penghinaan atau penolakan secara langsung, tetapi juga dapat muncul melalui perbandingan yang secara implisit merendahkan posisi kelompok lain (Kurnia et al., 2025). Oleh karena itu, koherensi pembeda dalam teks berfungsi sebagai alat untuk membangun hierarki budaya yang menentukan kelompok mana yang dianggap memiliki pengetahuan, kemampuan, dan legitimasi yang lebih tinggi.

c. Kata Ganti dalam Pembentukan Identitas Sosial

Kata ganti digunakan penulis untuk menunjukkan posisi seseorang dalam wacana. Kata ganti yang sering digunakan adalah saya, kita, kami, dan mereka. Kata ganti 'kita' dan 'kami' untuk menunjukkan pendapat yang sama, sementara kata ganti 'mereka' untuk menunjukkan pendapat yang berlawanan.

Data 2/11/4:

Sekeras apa juga **mereka** bekerja, takkan pernah naik status jadi orang kaya, bahkan sekadar orang pas-pasan. **Mereka** benar-benar tak paham bahwa sistem di bangsa inilah yang membuat **mereka** begitu.

Pada kutipan ini, kata ganti "mereka" digunakan secara berulang untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan mobilitas sosial dan ekonomi. Pengulangan tersebut membangun batas yang jelas antara kelompok yang dibicarakan dengan pihak yang mengamati atau menjelaskan kondisi mereka. Dalam perspektif Van Dijk, penggunaan kata ganti semacam ini berfungsi sebagai strategi ideologis untuk mengonstruksi identitas kelompok tertentu dalam wacana.

Secara tekstual, kelompok “mereka” digambarkan sebagai pihak yang terus bekerja keras tetapi tetap tidak mampu meningkatkan status ekonomi. Frasa “takkan pernah naik status jadi orang kaya” menunjukkan adanya hambatan struktural yang membuat kelompok tersebut sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Namun, penyebab kondisi tersebut tidak ditempatkan pada individu, melainkan pada “sistem di bangsa ini”. Dengan demikian, teks mengarahkan pembaca untuk melihat ketimpangan ekonomi sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil.

Jika dikaitkan dengan marginalisasi, kutipan ini menunjukkan marginalisasi ekonomi. Kelompok yang disebut “mereka” mengalami keterbatasan akses terhadap kesejahteraan akibat sistem yang dianggap mempertahankan ketimpangan. Dalam konteks analisis wacana kritis, penggunaan kata ganti tersebut memperkuat representasi masyarakat bawah sebagai kelompok yang dirugikan oleh struktur kekuasaan ekonomi yang lebih besar.

Data 43/350/6:

“Suara **kita** semua dibungkam selama ini. Sekalinya dibebaskan, rupanya, rupanya membuat kita saling memusnahkan.” “Ma... mau sampai kapan? Saya, saya hanya ingin hidup dengan baik-baik saja.”

Penggunaan kata “kita” menunjukkan bahwa penutur tidak hanya berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi juga mengatasnamakan kelompok yang lebih luas. Penggunaan kata ganti “kita” menciptakan solidaritas antara penutur dan masyarakat yang dianggap mengalami nasib serupa. Dalam teori Van Dijk, strategi ini sering digunakan untuk membangun identifikasi kelompok dan memperkuat legitimasi suatu pandangan.

Selain itu, frasa “dibungkam selama ini” mengindikasikan adanya pembatasan hak menyampaikan pendapat. Wacana kemudian berkembang pada gagasan bahwa kebebasan yang tiba-tiba diberikan justru memunculkan konflik sosial. Dengan demikian, teks tidak hanya berbicara mengenai individu, tetapi juga mengenai hubungan antara masyarakat dan sistem kekuasaan yang mengatur ruang kebebasan tersebut.

Bentuk marginalisasi dalam kutipan ini adalah marginalisasi politik. Masyarakat digambarkan sebagai kelompok yang kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi, sehingga hak partisipasi mereka dalam kehidupan publik menjadi terbatas. Kata ganti “kita” berfungsi untuk menunjukkan bahwa pengalaman pembungkaman tersebut bersifat kolektif, bukan kasus individual.

Temuan pada kedua data tersebut sejalan dengan berbagai penelitian Sukrin dan Muhlisina (2025) yang menunjukkan bahwa penggunaan pronomina tidak hanya berfungsi secara gramatikal, tetapi juga menjadi alat ideologis untuk membangun identitas kelompok, relasi kuasa, dan representasi sosial. Penelitian terdahulu oleh Kasman dkk., (2025) menjelaskan bahwa unsur sintaksis, termasuk pilihan pronomina, digunakan untuk membangun narasi kolektivitas, legitimasi kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dengan masyarakat.. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan karena penggunaan kata ganti “kita” juga berfungsi membangun identitas bersama dan menyatukan pendapat masyarakat dalam satu posisi sosial yang sama.

Berdasarkan analisis Van Dijk, penggunaan kata ganti “mereka”, “kita”, “kami”, dan “saya” dalam kutipan-kutipan tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai pengganti nomina, tetapi juga menjadi strategi ideologis untuk membangun identitas kelompok, menentukan posisi sosial, serta membedakan pihak yang dianggap dominan dan pihak yang dimarginalkan.

Data pertama menunjukkan kecenderungan marginalisasi ekonomi melalui representasi masyarakat yang terjebak dalam sistem ketimpangan, sedangkan data kedua menunjukkan marginalisasi politik melalui representasi masyarakat yang mengalami pembungkaman suara dan keterbatasan partisipasi dalam ruang publik. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu Kusumaningtyas dan Kurniawan (2025) yang menegaskan bahwa pilihan pronomina merupakan instrumen penting dalam merepresentasikan relasi kuasa dan praktik marginalisasi dalam teks.

(3) Stilistik

Stilistik merupakan gaya bahasa yang menggunakan bahasa yang khas. Ditemukan 22 data dari elemen leksikon yang menunjukkan marginalisasi. Pilihan kata ini dipilih dari beberapa pilihan kata yang ada untuk menunjukkan sikap atau ideologi tertentu penulis.

Data 18/166/3:

Distrik-distrik **rendah**, tempat kamu lewat setiap hari, lebih mudah diatur daripada distrik lain.” Ia geleng-geleng. “Andai distrik lain juga begitu. Pekerjaanku takkan sesulit sekarang.”

Secara leksikal, frasa “distrik-distrik rendah” bukan sekadar penanda wilayah geografis, melainkan label sosial yang mengandung hierarki. Kata rendah memiliki padanan yang lebih netral seperti bawah, pinggiran, atau luar pusat. Namun, penulis memilih kata “rendah” yang secara semantik mengandung makna inferior, kurang bernilai, dan berada di bawah kelompok lain.

Pilihan leksikon tersebut menunjukkan adanya konstruksi sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu. Masyarakat yang tinggal di “distrik rendah” diposisikan sebagai kelompok yang lebih mudah diatur dan dikendalikan dibandingkan wilayah lain. Dengan demikian, teks tidak hanya menggambarkan perbedaan ruang, tetapi juga menciptakan perbedaan status sosial.

Dalam perspektif marginalisasi, frasa ini menunjukkan marginalisasi sosial ekonomi. Kelompok yang berada di distrik rendah direpresentasikan sebagai masyarakat kelas bawah yang memiliki akses terbatas terhadap kekuasaan, fasilitas, dan kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Mereka menjadi objek pengaturan, bukan subjek yang memiliki kuasa. Melalui pilihan kata tersebut, tampak adanya reproduksi relasi dominasi antara kelompok elite dan kelompok bawah.

Data 41/339/11:

*Kalian mau ikut juga? Tanya caranya pada Kerajaan dan Pemangku Adat. Mereka punya banyak **ternak penggaung** seperti saya ini.*

Leksikon “ternak penggaung” merupakan pilihan kata yang sangat ideologis. Secara harfiah, kata ternak merujuk pada hewan yang dipelihara untuk kepentingan pemiliknya. Ketika kata tersebut dilekatkan pada manusia, terjadi proses dehumanisasi, yaitu penghilangan identitas manusia sebagai individu yang merdeka dan berpikir. Sementara itu, kata penggaung menunjukkan pihak yang

hanya mengulang atau menyebarkan suara orang lain. Gabungan kedua kata tersebut menghasilkan citra bahwa individu-individu tertentu hanyalah alat propaganda yang dipelihara oleh penguasa untuk menyuarakan kepentingannya.

Dalam konteks marginalisasi, frasa ini menunjukkan marginalisasi politik. Individu tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang memiliki kebebasan berpikir, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang dapat digunakan untuk membentuk opini publik. Penguasa ditempatkan sebagai kelompok dominan yang memiliki kendali atas produksi dan penyebaran wacana, sedangkan masyarakat menjadi objek manipulasi politik. Pilihan leksikon ini juga memperlihatkan kritik pengarang terhadap praktik hegemoni kekuasaan. Melalui kata ternak, pengarang secara tidak langsung menolak praktik politik yang menjadikan manusia sekadar alat legitimasi kekuasaan.

Sementara itu, temuan mengenai “ternak penggaung” sejalan dengan penelitian Ulya (2026) yang menunjukkan bahwa pilihan leksikon dalam wacana politik dan media digunakan untuk membentuk persepsi publik terhadap relasi kuasa, legitimasi, dan kontrol sosial. Pilihan kata tertentu dapat memperkuat posisi kelompok dominan sekaligus melemahkan kelompok yang berada di luar kekuasaan. Selain itu, penelitian Sutrisna dkk., (2025) mengenai isu pemberitaan ormas grib di Bali menunjukkan bahwa leksikon dalam wacana berfungsi sebagai instrumen ideologis untuk membangun citra, legitimasi, serta posisi kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan. Temuan ini mendukung analisis bahwa istilah seperti “ternak penggaung” merupakan bentuk kritik terhadap praktik dominasi politik yang bekerja melalui kontrol wacana.

Berdasarkan analisis leksikon Van Dijk, pilihan kata dalam teks tidak hadir secara netral, melainkan menjadi sarana ideologis untuk membangun realitas sosial tertentu. Leksikon “distrik-distrik rendah” merepresentasikan marginalisasi sosial-ekonomi melalui pelabelan kelas yang menempatkan kelompok tertentu sebagai pihak yang inferior dan mudah dikendalikan. Sementara itu, leksikon “ternak penggaung” merepresentasikan marginalisasi politik melalui dehumanisasi individu yang diposisikan sebagai alat reproduksi suara kekuasaan. Kedua leksikon tersebut menunjukkan bahwa bahasa dalam teks berfungsi sebagai instrumen kritik terhadap struktur dominasi yang menghasilkan ketimpangan sosial dan politik.

(4) Retoris

Retoris merupakan cara bagaimana suatu peristiwa penting ditekankan dalam sebuah wacana. Ditemukan 29 data dari kedua elemen retoris yang menunjukkan marginalisasi.

a. Grafis atau Ekspresi

Grafis seringkali disamakan dengan ekspresi, elemen ini menggunakan huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf kapital, *caption*, *raster*, grafik, gambar, atau tabel untuk menekan suatu wacana yang dianggap penting.

Data 2/11/5:

Jutaan tangan dan kaki yang sibuk mencari makan adalah jutaan kepala yang takkan sempat berpikir dan jutaan mulut yang tak bisa bicara.

Pada kalimat tersebut, huruf miring digunakan untuk mempertegas keseluruhan gagasan bahwa masyarakat yang terus-menerus berjuang memenuhi kebutuhan hidup kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis dan menyampaikan pendapat. Pilihan diksi "jutaan tangan dan kaki", "jutaan kepala", dan "jutaan

mulut" membentuk metafora yang merepresentasikan manusia hanya sebagai alat produksi. Individu tidak lagi dipandang sebagai subjek yang memiliki kesadaran, melainkan sebagai tenaga kerja yang terus bergerak demi bertahan hidup. Secara retorik, huruf miring berfungsi menarik perhatian pembaca pada hubungan sebab-akibat yang dibangun teks. Kesibukan mencari makan digambarkan bukan hanya sebagai persoalan ekonomi, melainkan sebagai mekanisme yang membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik.

Dalam konteks marginalisasi, kalimat ini menunjukkan marginalisasi ekonomi. Kemiskinan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan kelompok bawah tidak memiliki cukup waktu, energi, maupun akses untuk mengembangkan kesadaran kritis. Akibatnya, mereka tersisih dari proses pengambilan keputusan dan kehilangan ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya menghasilkan kekurangan material, tetapi juga membatasi partisipasi sosial dan politik masyarakat.

Data 2/16/1:

Saat kereta itu hendak berangkat kembali, wajah dua pemimpin NKAL hilang dan berganti pesan layanan masyarakat: ***MARI KITA SAMBUT, TIGA HARI LAGI, HARI BEBAS BICARA! UNGKAP SEMUA!***

Penggunaan huruf kapital penuh menjadikan kalimat tersebut menyerupai slogan propaganda atau pengumuman resmi negara. Secara visual, huruf kapital menciptakan kesan keras, dominan, dan memaksa sehingga perhatian pembaca langsung tertuju pada pesan yang disampaikan. Namun, jika dibaca dalam konteks cerita yang menampilkan kontrol negara terhadap masyarakat, slogan tersebut mengandung ironi. Kebebasan berbicara yang diumumkan secara besar-

besaran justru menunjukkan bahwa kebebasan tersebut berada di bawah pengaturan negara. Artinya, hak berbicara bukan sesuatu yang melekat pada warga negara, melainkan sesuatu yang diberikan dan diatur oleh penguasa.

Dalam perspektif marginalisasi, data ini menunjukkan marginalisasi politik. Negara memiliki kuasa untuk menentukan kapan masyarakat boleh berbicara dan dalam batas seperti apa kebebasan itu dapat dilakukan. Relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak yang bergantung pada otoritas negara. Dengan demikian, huruf kapital tidak hanya berfungsi sebagai penekanan grafis, tetapi juga menjadi simbol dominasi politik yang membatasi kebebasan warga.

Temuan pada data pertama memperlihatkan bahwa kemiskinan dapat menjadi instrumen yang membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitorus dkk., (2025) yang menemukan bahwa dalam analisis wacana Van Dijk, konteks sosial dan praktik kekuasaan berpengaruh terhadap akses individu dalam membentuk maupun menyampaikan wacana. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki akses lebih rendah cenderung berada pada posisi yang lebih mudah dimarginalkan.

Sementara itu, temuan pada data kedua berkaitan dengan dominasi kekuasaan dalam mengendalikan informasi dan membentuk kesadaran publik. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rohimi (2025) yang menemukan bahwa representasi wacana dalam media dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu sehingga membentuk pemahaman publik sesuai kepentingan pihak yang

berkuasa. Dalam penelitian tersebut, praktik pembingkaiian wacana digunakan untuk mengarahkan cara masyarakat memaknai suatu realitas sosial dan politik.

Berdasarkan analisis elemen grafis, huruf miring dan huruf kapital dalam data tidak hanya berfungsi sebagai penekanan visual, tetapi juga menjadi sarana ideologis untuk memperkuat kritik terhadap ketimpangan sosial dan relasi kuasa. Data pertama menunjukkan marginalisasi sosial ekonomi melalui gambaran masyarakat yang kehilangan kesempatan berpikir kritis akibat tekanan ekonomi, sedangkan data kedua menunjukkan marginalisasi politik melalui kontrol negara atas kebebasan berbicara. Kedua data tersebut memperlihatkan bahwa strategi grafis dalam wacana berfungsi mempertegas posisi kelompok yang dimarginalkan sekaligus mengungkap praktik kekuasaan yang bekerja di balik teks.

b. Metafora

Metafora merupakan salah satu cara penulis menekankan wacana penting dan memperkuat pesan utama dengan menggunakan ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan kutipan yang diambil dari ayat suci.

Data 1/3/6:

Dinding rumah-rumah perkampungan tengah kota itu juga **seakan marah** mengusir mereka.

Secara literal, dinding tidak mungkin memiliki emosi atau kemampuan untuk mengusir seseorang. Namun, pengarang memberikan sifat manusia (metafora personifikasi) kepada dinding-dinding rumah sehingga lingkungan fisik tampak ikut menolak keberadaan tokoh. Metafora ini memperlihatkan bahwa penolakan terhadap tokoh bukan hanya datang dari individu tertentu, melainkan

telah menjadi sikap kolektif masyarakat. Rumah sebagai simbol ruang sosial dan penerimaan sosial justru berubah menjadi simbol eksklusif. Dengan demikian, tokoh ditempatkan sebagai pihak yang tidak memiliki ruang untuk diterima dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks marginalisasi sosial, metafora tersebut menunjukkan proses pengucilan yang dialami tokoh. Penolakan tidak lagi muncul dalam bentuk tindakan langsung, melainkan telah melekat pada lingkungan sosial itu sendiri. Tokoh diposisikan sebagai "orang luar" yang keberadaannya dianggap tidak diinginkan. Secara ideologis, metafora ini membangun dikotomi antara kelompok dominan yang berhak menentukan siapa yang diterima dan kelompok yang harus disingkirkan. Pengucilan tersebut merupakan bentuk marginalisasi sosial karena individu kehilangan akses terhadap penerimaan, rasa aman, dan pengakuan dari lingkungan sosialnya.

Data 31/254/2:

Sepuluh menit pertama, jumlah berita, ujaran kebencian, fitnah, perundungan meledak tinggi. Satu negeri berubah jadi **singa yang lapar.**

Metafora ini mengubah masyarakat secara keseluruhan menjadi seekor singa lapar. Singa identik dengan predator yang agresif, sedangkan rasa lapar melambangkan dorongan untuk menyerang tanpa banyak pertimbangan. Melalui metafora ini, masyarakat digambarkan sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak terkendali akibat ledakan berita, ujaran kebencian, fitnah, dan perundungan. Publik tidak lagi berperan sebagai penilai yang rasional, melainkan sebagai massa yang siap memangsa pihak yang dianggap bersalah.

Pengarang menggunakan metafora tersebut untuk memperkuat gambaran tentang kekuatan opini publik yang dapat berubah menjadi ancaman sosial. Metafora ini menunjukkan bagaimana individu atau kelompok tertentu dapat menjadi sasaran persekusi sosial ketika opini publik telah terbentuk secara negatif. Dalam situasi demikian, kelompok yang dituduh atau dicap buruk kehilangan kesempatan untuk membela diri karena telah lebih dahulu dihakimi oleh masyarakat.

Marginalisasi yang muncul bersifat sosial dan politik. Secara sosial, individu kehilangan reputasi dan penerimaan masyarakat. Secara politik, metafora ini menunjukkan bagaimana kekuatan massa dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang membuat kelompok tertentu tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Dengan kata lain, metafora "singa yang lapar" merepresentasikan mekanisme eksklusi sosial melalui tekanan opini publik yang masif.

Temuan mengenai metafora sebagai alat pembentukan marginalisasi sosial sejalan dengan beberapa penelitian wacana kritis di Indonesia. Fristyawan (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa metafora hewan dan metafora ruang dalam teks media digunakan untuk membangun citra negatif terhadap kelompok tertentu sehingga memperkuat praktik eksklusi sosial. Temuan tersebut mendukung data "dinding-dinding rumah seakan marah" yang menunjukkan penolakan sosial secara simbolik. Begitu pula dengan penelitian Priyanata dan Srikandi (2026) menunjukkan bahwa bahasa figuratif dalam pemberitaan dan media sosial berperan dalam membentuk stigma kolektif yang mendorong penghakiman massa terhadap individu atau kelompok tertentu.

Hasil ini selaras dengan metafora "satu negeri berubah jadi singa yang lapar" yang menggambarkan publik sebagai kekuatan kolektif yang agresif terhadap pihak yang menjadi sasaran tuduhan. Berdasarkan teori Van Dijk, metafora tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ornamen bahasa, melainkan juga sebagai strategi retorik untuk membangun representasi negatif terhadap kelompok tertentu dan mereproduksi relasi kuasa dalam masyarakat.